



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT  
**SUB UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NINIK DEWI NURCAHYANI**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **411719**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 200.000.000

1. Tanah Seluas 335 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 291.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI  
Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI  
Rp. 110.000.000
4. MOTOR, VESPA VESPA LX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
29.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
6. MOTOR, YAMAHA YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 28.000.000
7. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 143.000.000

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.296.751.433

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.930.751.433



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.930.751.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.